

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik di negara berkembang maupun Negara maju, namun pada umumnya tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kondisi ini dibutuhkan penyediaan layanan dalam melatih dan menyediakan lapangan kerja bagi setiap warga negara. Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari kerja (Rafiqet al., 2010).

Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan menurunkan kemakmuran, semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan (Sukirno., 2000).

Stober., (2015) mengatakan bahwa tidak ada negara tanpa pengangguran dan tingkat pengangguran merupakan salah satu alat dasar untuk mengukur kinerja ekonomi setiap negara. Tingkat pengangguran juga merupakan indikator bagi investor asing dalam menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi pada negara tersebut, karena tingkat pengangguran yang rendah dapat menggambarkan stabilnya perekonomian sehingga investor asing tertarik untuk berinvestasi dan begitupun sebaliknya.

Dependency ratio atau rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi penting yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Mantra., (2000) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk beban tanggungan penduduk, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum produktif. Pada umumnya, negara-negara yang sedang berkembang dengan tingkat fertilitas yang tinggi mempunyai angka rasio beban tanggungan yang tinggi.

Namun di Indonesia rasio ketergantungan menunjukkan penurunan sejak tahun 1990 dimana rasio usia ketergantungan (*age dependency ratio*) Indonesia mencapai 68 persen dan terus menurun hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 48 persen. Masalah lain yang melanda perekonomian negara adalah pertumbuhan ekonomi, melalui GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB (Produk Domestik Bruto) pertumbuhan ekonomi dijadikan tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara dan PDRB untuk setiap wilayah lininya.

Dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempunyai peran yang penting karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu keberhasilan pembangunan ekonomi yang akan mewujudkan pemerataan kemakmuran penduduk dalam suatu negara. Dengan meningkatnya kapasitas pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sektor industri yang dapat meningkatkan output sehingga dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk (Tambunan., 2001).

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan dalam usaha membangun suatu bangsa pada umumnya. Penduduk memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli dan usahawan. Sebagai akibat dari beberapa fungsinya ini penduduk bukan saja sebagai faktor produksi akan tetapi yang lebih penting lagi penduduk merupakan unsur yang dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi serta mengorganisasikan penggunaan faktor produksi secara efektif dan efisien.

Di negara-negara berkembang, masalah penduduk menjadi isu sentral sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini dikarenakan pada umumnya dinegara-negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduk relatif sangat tinggi dan pada sisi lain lapangan kerja semakin sempit sebagai akibat minimnya investasi yang dilakukan, kondisi ini akan berujung pada tingginya angka pengangguran dan terciptanya kemiskinan dinegara- negara berkembang.

Pengangguran timbul karena ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerja yang ada, berarti mereka yang tidak tertampung menjadi menganggur. Di sini dibutuhkan peranan pemerintah yang kreatif dan aktif untuk memperluas lapangan kerja atau dengan kata lain menciptakan terobosan-terobosan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi harus mengutamakan pembangunan sektor-sektor yang mampu menyerap pengangguran. Kenyataan yang sekarang

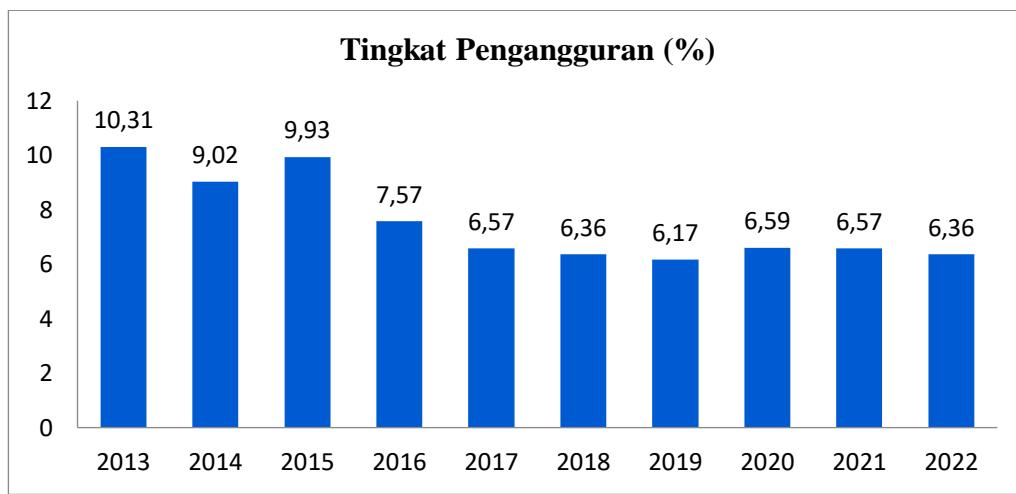
terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan. ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumber daya alam, pekerjaan, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada kondisi yang sangat memprihatinkan.

Dalam teori Keynes sesungguhnya masalah pengguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Dari tahun ketahun pertumbuhan penduduk relatif mengalami peningkatan dan hal itu juga akan mempengaruhi pada pertumbuhan angkatan kerja.

Selanjutnya Keynes menjelaskan bahwa permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat tidak hanya dapat dilimpahkan kepada mekanisme pasar bebas, karena ketika tenaga kerja meningkat, maka upah akan menurun sehingga hal ini akan merugikan bukan menguntungkan sebab bila terjadi penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, partisipan angkatan kerja dan upah minimum.

Menurut Sumitro Djojohadikusomo., (1994), masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi kestabilan sosial politik

dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Adapun tingkat pengangguran di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh

Dari gambar 1.1 di atas bisa kita lihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Aceh sepuluh tahun terakhir, pada tahun 2013 menjadi yang paling tinggi yaitu 10,31 persen dan untuk tahun 2014 mengalami penurunan diangka 9.02 persen, ditahun 2015 naik diangka 9.93 persen, pada tahun 2016 turun diangka 7.57 persen, pada tahun 2017 mengalami penurunan satu persen menjadi 6.57 persen, pada tahun 2018 diangka 6.36 persen, tahun 2019 hanya mengalami sedikit penurunan diangka 6.17 persen, tahun 2020 kembali naik sedikit diangka 6,59 persen, tahun 2021 diangka 6,57 persen, dan pada tahun 2022 turun sedikit diangka 6,36 persen.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan acuan sebagai indikator keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. Indikator tersebut misalnya masalah tentang inflasi dan pengangguran serta kesejahteraan masyarakat yang membaik. Salah satu faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja.

Masalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari setiap periode berikutnya, negara akan mengalami peningkatan kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan ini sebagai akibat dari peningkatan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitas. Sedangkan salah satu faktor produksi yang sangat penting yakni sumber daya manusia.

Unsur pokok dari faktor produksi suatu negara ada tiga, yakni yang pertama adalah sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Kedua sumber daya insani (jumlah penduduk) berperan dalam proses pertumbuhan output, artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Ketiga yakni stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output (Sukirno., 2006:333).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri Amir., 2007).

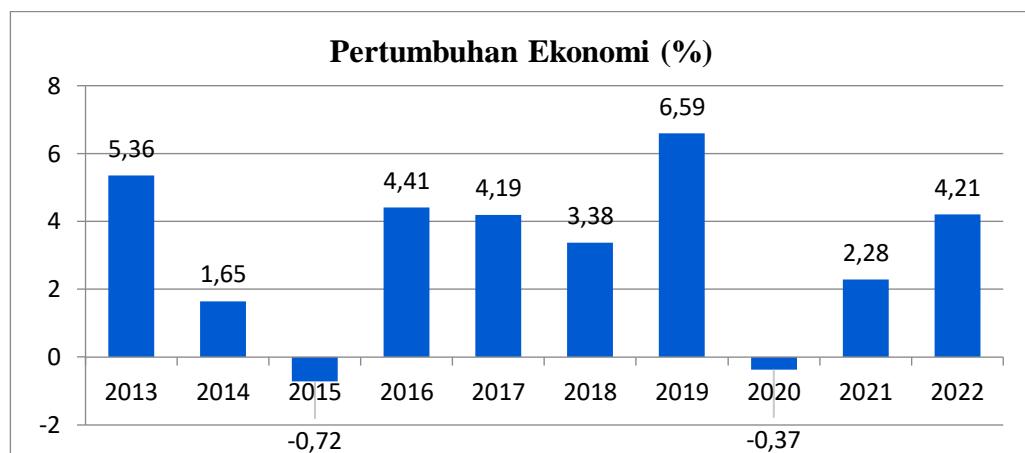
Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T. H. Tambunan., 2009).

Menurut teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Artinya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. Hal itu terjadi karena saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut naik dengan bagitu proses produksi nya akan mengalami kenaikan pula. Dan hal itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output produksi yang diminta.

Pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama bagi suatu negara, setiap negara akan melakukan berbagai strategi untuk dapat menunjang tercapainya keberhasilan pertumbuhan ekonominya. Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi jika pendapatan riil masyarakat pada periode tertentu lebih tinggi daripada pendapatan periode sebelumnya. Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), PDB dan PDRB adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun (Sukirno., 2016).

Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena produk domestik bruto menyatakan pendapatan total dan

pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa, serta memiliki tujuanya untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw., 2006:). Meningkatnya Produk Domestik Bruto setiap tahun mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi juga meningkat. Adapun tingkat pengangguran di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



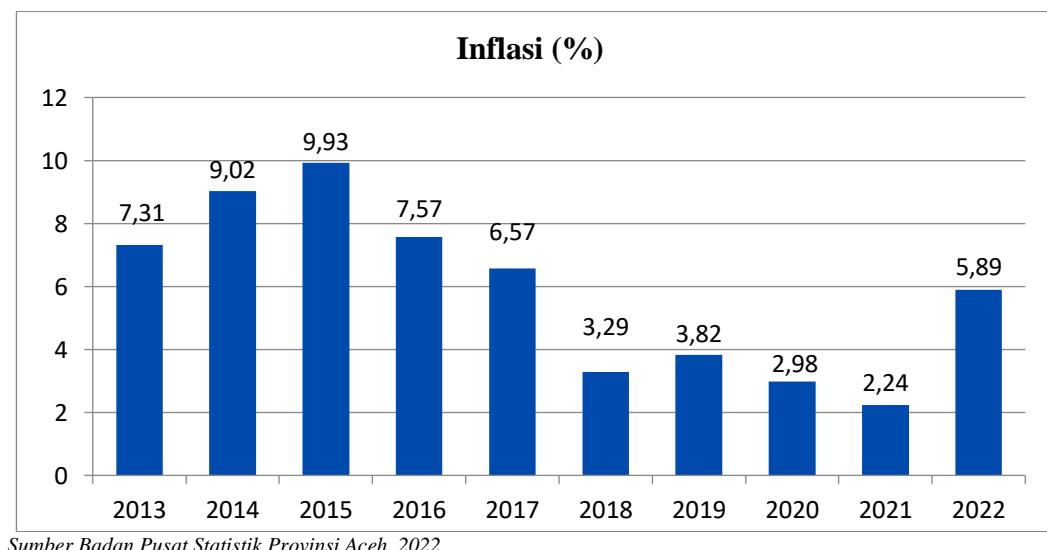
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami naik turun yang tidak seimbang. Pada tahun 2013 diangka 5.36 persen, pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu diangka 1.65 persen, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh juga mengalami penurunan yaitu -0.72 persen sangat jauh turun dibandingkan dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2016 kembali naik diangka 4.41 persen menjadi lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang sangat menurun, pada tahun 2017 turun sedikit diangka 4.19 persen, pada tahun 2018 turun satu persen diangka 3.28 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya diangka

6.59 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tinggi yaitu diangka -0.37 persen, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang yaitu diangka 2.81 persen lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 data yang sudah ada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berada diangka 4.21 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh mengalami kenaikan.

Apabila inflasi ditekan dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pengangguran adalah salah satu simbol dari rendahnya produksi nasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Maknun., 1995). Adapun tingkat pengangguran di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.3 Inflasi di Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Aceh sepuluh tahun terakhir. pada tahun 2013 berada diangka 7.31 persen, pada tahun 2014 naik hampir 2 persen, yaitu 9.02 persen, tahun 2015 kembali naik

diangka 9.93 persen, tahun 2016 mengalami penurunan diangka 7.57 persen, tahun 2017 turun 1 persen yaitu 6.57, tahun 2018 mengalami penurunan diangka 3.29 persen, tahun 2019 naik sedikit diangka 3.82 persen, tahun 2020 berada diangka 2.98 persen, tahun 2021 berada diangka 2.24 persen, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan diangka 5.89 persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amir Amri., (2007), bahwa peningkatan angkatan kerja di indonesia tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran bertambah seiring penambahan angkatan kerja. Berarti dapat disimpulkan jika pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut grafik pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Aceh sepuluh tahun terakhir.



Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.4 Pertumbuhan Angkatan Kerja Di Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.4 di atas bisa kita lihat bahwa pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Aceh dari tahun 2013-2022 mengalami naik turun. Dilihat dari

tahun 2013 yang awalnya berada diangka 6,47 persen, di tahun 2014 berada diangka 5,24 persen, pada tahun 2015 pertumbuhan angkatan kerja Provinsi Aceh naik diangka 6,21 persen, pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan diangka 7,56 persen, pada tahun 2017 kembali turun diangka 4,80 persen, pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi diangka 10,7 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sedikit yaitu diangka 9,53 persen, pada tahun 2020 berada diangka 9,52 persen, 2021 mengalami penurunan sedikit menjadi 8,54 persen, dan pada tahun 2022 pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Aceh kembali melonjak naik diangka 10,47 persen

Pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Aceh sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat drastis, Jika kenaikan angkatan kerja seperti ini tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan. Dengan demikian masyarakat tidak akan sejahtera. Dan akibat dari tingginya tingkat pengangguran maka kejahatan akan merajalela di Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjelasan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh?
2. Seberapa besarkah pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh?

3. Seberapa besarkah pengaruh pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan manfaat bagi penulis.
 - b. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik atau bahan acuan untuk perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi pustaka, sebagai literature bagi pengembangan penelitian berikut.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran dari Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh.
- b. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Aceh.